

SIARAN PERS

Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Gorontalo



**PENYERAHAN LAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA ATAS
EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI PADA PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI GORONTALO DAN
PENYERAHAN LAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN PAD PADA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DAN
INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI KWANDANG**

Gorontalo, 23 Desember 2021

Bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga No 3, Dulomo Selatan, Kota Utara, Kota Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, Pukul 16.00 WITA dilaksanakan kegiatan Penyerahan Laporan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo dan Penyerahan Laporan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan PAD Untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d. Semester I 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Kwandang.

Acara Penyerahan Laporan Pemeriksaan Kinerja dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Dwi Sabardiana, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puh, Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Hamzah Sidik, Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara, Husin Halidi, serta Pejabat Struktural dan Fungsional BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Kegiatan Penyerahan Laporan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo dan Penyerahan Laporan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan PAD Untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d. Semester I 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Kwandang dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan, bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran virus, yaitu dengan tidak berkumpul dalam jumlah besar, menjaga jarak, mengenakan masker serta rajin mencuci tangan.

Dwi Sabardiana dalam sambutannya menyampaikan bahwa Laporan Hasil Kinerja bertujuan untuk untuk menilai efektivitas penyelenggaraan reformasi pendidikan vokasi Sekolah Menengah

Kejuruan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mencapai SDM yang berkualitas dan berdaya saing dan menilai efektivitas pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal daerah TA 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Kepala perwakilan menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan atas efektivitas penyelenggaraan pendidikan vokasi yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah diantaranya:

1. Pemerintah Provinsi Gorontalo belum menyediakan seluruh kebijakan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan reformasi pendidikan vokasi SMK.
2. Pemerintah Provinsi Gorontalo belum menyelenggarakan reformasi pendidikan vokasi SMK secara menyeluruh, yang meliputi penataan SMK berdasarkan basis permintaan tenaga kerja, penyesuaian kurikulum sesuai kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI), implementasi pembelajaran yang berfokus pada praktikum dan metode kerja di DUDI, pemenuhan jumlah dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pemantauan penjaminan mutu pendidikan.
3. Pemerintah Provinsi Gorontalo belum mendorong keterlibatan DUDI dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi SMK.
4. Pemerintah Provinsi Gorontalo belum menyelenggarakan pendidikan vokasi SMK yang mampu mewujudkan siswa yang siap kerja dan berwirausaha.

BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo belum efektif melakukan reformasi penyelenggaraan pendidikan vokasi SMK dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, hal ini ditandai dengan:

1. Pemerintah Provinsi Gorontalo belum menempatkan siswa SMK sebagai subjek dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi;
2. Pemerintah Provinsi Gorontalo belum mengimbangi upaya Pemerintah Pusat dalam melakukan reformasi pendidikan vokasi SMK, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penyediaan kebijakan reformasi pendidikan vokasi SMK secara lengkap
 - b) Prioritas program, kegiatan dan anggaran pada pelaksanaan reformasi pendidikan vokasi SMK dengan penetapan indikator kinerja yang mampu mengukur keberhasilan berdasarkan asas manfaat;
 - c) Penyediaan tenaga pendidik yang cukup dan kompeten; dan
 - d) Transformasi penyelenggaraan pendidikan vokasi SMK melalui penyediaan kurikulum yang mampu menghasilkan siswa menjadi tenaga kerja dan berwirausaha yang efisien
3. Pemerintah Provinsi Gorontalo belum menempatkan DUDI sebagai mitra dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi SMK dengan pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Selanjutnya, Kepala perwakilan menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan atas menilai efektivitas pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal daerah yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tidak memiliki regulasi dan kebijakan yang

mendukung pengelolaan PAD, serta belum menjabarkan peningkatan PAD dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai RPJMD, sehingga belum menjadikan peningkatan PAD sebagai prioritas untuk mendorong kemandirian fiskal daerah

2. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tidak memberikan dukungan kelembagaan yang memadai, di mana belum disiapkan mekanisme alur koordinasi lintas SKPD serta dukungan SDM untuk bersinergi dalam mengelola dan meningkatkan PAD
3. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tidak merencanakan dan melaksanakan kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan penerimaan dari objek dan subjek PAD yang telah terdaftar, serta tidak melaksanakan kegiatan ekstensifikasi untuk mengidentifikasi dan menjangkau objek dan subjek PAD yang belum terdaftar dalam rangka mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan;
4. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tidak melakukan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mendukung peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan; dan
5. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tidak membina dan mengawasi BUMD yang dimiliki secara memadai untuk mendukung peningkatan penerimaan daerah.

BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara :

1. Telah memiliki visi pembangunan jangka menengah yang memuat cita-cita peningkatan Pendapatan Asli Daerah, telah menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, serta telah melakukan upaya intensifikasi Pajak Daerah;
2. Tidak membuka Ruang Fiskal untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan masih bergantung pada Dana Transfer;
3. Tidak memiliki komitmen pelayanan publik yang jelas dan terukur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan;
4. Tidak memiliki model penilaian kinerja yang menjamin kesesuaian antara kewenangan dan/atau tugas dan fungsi dengan upaya yang dilaksanakan unit dan/atau individu;
5. Tidak mengubah paradigma Aparatur yang bergantung pada sumber daya manusia, anggaran, prosedur, dan sarana, serta tidak mengembangkan cara kerja yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
6. Tidak mengembangkan kapasitas organisasi untuk menunjang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan;
7. Tidak mengembangkan strategi koordinasi yang sinergis antar SKPD dan/atau lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara; dan
8. Tidak membina dan mengawasi BUMD yang dimiliki secara memadai untuk mendukung peningkatan penerimaan daerah.

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah terkait memberikan perhatian yang serius dengan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK melalui Laporan Hasil Pemeriksaan.

Adapun sambutan dari Pemerintah Daerah yang diwakilkan oleh Wakil Ketua DPRD, Sofyan Puh, menyatakan bahwa pemerintah daerah mengapresiasi atas pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan selanjutnya akan menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai upaya perbaikan kinerja pemerintah daerah. (htu/gto)

Subbagian Humas dan TU Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
Email: perwakilan.gorontalo@bpk.go.id